

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 14 TAHUN 2025
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026

10. Penandaan Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Daerah untuk Kegiatan yang Telah
Ditentukan Bagi Hasil Pajak Rokok

a. Sub Kegiatan

No.	Kode	Uraian
1	1.02.02.2.01.0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya
2	1.02.02.2.01.0002	Pembangunan Puskesmas
3	1.02.02.2.01.0003	Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya
4	1.02.02.2.01.0004	Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan
5	1.02.02.2.01.0006	Pengembangan Puskesmas
6	1.02.02.2.01.0007	Pengembangan Fasilitas Kesehatan Lainnya
7	1.02.02.2.01.0008	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Sakit
8	1.02.02.2.01.0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas
9	1.02.02.2.01.0010	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
10	1.02.02.2.01.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga
11	1.02.02.2.01.0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
12	1.02.02.2.01.0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi
13	1.02.02.2.01.0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat
14	1.02.02.2.01.0022	Pengembangan Rumah Sakit
15	1.02.02.2.01.0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan
16	1.02.02.2.01.0025	Pengembangan Pendekatan Pelayanan Kesehatan di DTPK (Pelayanan Kesehatan Bergerak, Gugus Pulau, Pelayanan Kesehatan Berbasis Telemedicine)
17	1.02.02.2.01.0026	Distribusi Alat Kesehatan, Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan
18	1.02.02.2.02.0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
19	1.02.02.2.02.0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
20	1.02.02.2.02.0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
21	1.02.02.2.02.0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
22	1.02.02.2.02.0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan
23	1.02.02.2.02.0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
24	1.02.02.2.02.0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
25	1.02.02.2.02.0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
26	1.02.02.2.02.0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
27	1.02.02.2.02.0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat
28	1.02.02.2.02.0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
29	1.02.02.2.02.0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV
30	1.02.02.2.02.0013	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB)
31	1.02.02.2.02.0014	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana
32	1.02.02.2.02.0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
33	1.02.02.2.02.0016	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
34	1.02.02.2.02.0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
35	1.02.02.2.02.0018	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
36	1.02.02.2.02.0019	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya
37	1.02.02.2.02.0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan

No.	Kode	Uraian
38	1.02.02.2.02.0021	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)
39	1.02.02.2.02.0022	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA
40	1.02.02.2.02.0024	Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan
41	1.02.02.2.02.0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular
42	1.02.02.2.02.0026	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
43	1.02.02.2.02.0027	Deteksi Dini Penyalahgunaan NAPZA di Fasyankes dan Sekolah
44	1.02.02.2.02.0028	Pengambilan dan Pengiriman Spesimen Penyakit Potensial KLB ke Laboratorium Rujukan/Nasional
45	1.02.02.2.02.0029	Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat
46	1.02.02.2.02.0030	Penyediaan Telemedicine di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
47	1.02.02.2.02.0032	Operasional Pelayanan Rumah Sakit
48	1.02.02.2.02.0033	Operasional Pelayanan Puskesmas
49	1.02.02.2.02.0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
50	1.02.02.2.02.0035	Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota
51	1.02.02.2.02.0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)
52	1.02.02.2.02.0037	Pelaksanaan Kewaspadaan Dini dan Respon Wabah
53	1.02.02.2.02.0038	Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)
54	1.02.02.2.02.0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis
55	1.02.02.2.02.0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)
56	1.02.02.2.02.0042	Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria
57	1.02.02.2.02.0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok
58	1.02.02.2.02.0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi
59	1.02.02.2.02.0045	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerapan SPM Bidang Kesehatan Kabupaten/Kota
60	1.02.02.2.02.0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak
61	1.02.02.2.02.0047	Pengelolaan Pelayanan Kelanjutusiaan
62	1.02.02.2.02.0050	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji
63	1.02.02.2.03.0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
64	1.02.02.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya
65	1.02.02.2.04.0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
66	1.02.02.2.04.0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan
67	1.02.02.2.04.0004	Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan
68	1.02.02.3.02.0047	Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan lainnya
69	1.02.02.3.02.0058	Pelayanan Kesehatan orang dengan Penyakit penyakit menular lain dan penyakit tidak menular yang spesifik di wilayah kabupaten/kota
70	1.02.02.3.02.0059	Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan
71	1.02.02.3.02.0060	Penyusunan tim kolaborasi advokasi hambatan dalam pencapaian SPM kesehatan.

No.	Kode	Uraian
72	1.02.02.3.02.0061	Verifikasi dan penerbitan perizinan berusaha pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit di wilayah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
73	1.02.02.3.02.0062	Penanggulangan penyakit IMS
74	1.02.02.3.02.0063	Penanggulangan penyakit Malaria
75	1.02.02.3.02.0064	Penanggulangan penyakit Kusta
76	1.02.02.3.02.0065	Penanggulangan penyakit Filariasis
77	1.02.02.3.02.0066	Penanggulangan penyakit Kecacingan
78	1.02.02.3.02.0067	Penanggulangan penyakit Frambusia
79	1.02.02.3.02.0068	Penanggulan Penyakit yang dapat dicegah dengan Imunisasi
80	1.02.02.3.02.0069	Penanggulangan penyakit tidak menular serta masalah kesehatan jiwa di wilayah daerah kabupaten/kota
81	1.02.02.3.02.0070	Pengelolaan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) dan sistem rujukan
82	1.02.02.4.02.0047	Pelaksanaan Dukungan pelayanan kesehatan lainnya
83	1.02.02.4.02.0059	Penyusunan Kebijakan/Regulasi Bidang kesehatan
84	1.02.03.2.01.0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
85	1.02.03.2.01.0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan
86	1.02.03.2.02.0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan
87	1.02.03.2.02.0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
88	1.02.03.2.02.0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan
89	1.02.03.2.03.0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
90	1.02.03.3.05.0001	Pelaksanaan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia
91	1.02.03.4.05.0001	Pelaksanaan jaminan keamanan bagi tenaga kesehatan khususnya di daerah terpencil dan/atau rawan konflik dengan mendayagunakan potensi Masyarakat Hukum Adat setempat dan/atau melalui kerja sama dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia
92	1.02.04.2.01.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)
93	1.02.04.2.02.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga
94	1.02.04.2.03.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga

No.	Kode	Uraian
95	1.02.04.2.04.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)
96	1.02.04.2.05.0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan
97	1.02.04.2.06.0001	Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan
98	1.02.05.2.01.0001	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
99	1.02.05.2.01.0002	Teknologi Tepat Guna (TTG) sesuai lokal spesifik daerah dalam pengamanan kualitas air minum dan sanitasi aman
100	1.02.05.2.02.0001	Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat
101	1.02.05.2.02.0002	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
102	1.02.05.2.03.0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)
103	1.02.07.3.02.0001	Peningkatan Mutu fasilitas pelayanan kesehatan lain kabupaten/ kota
104	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum
105	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah
106	2.13.04.2.01.0004	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa
107	2.16.02.2.01.0015	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat

b. Sumber Dana

No.	Kode	Uraian
1	2.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok

c. Rekening Pendapatan

No.	Kode	Uraian
1	4.2.02.01.01.0005	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok

d. Rekening Belanja

No.	Kode	Uraian
1	5.1.02.02.02.0002	Belanja Kontribusi Jaminan Kesehatan bagi PBI
2	5.1.02.02.02.0003	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3
3	5.1.02.02.02.0004	Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3